



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Pembina PPID;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. Atasan PPID;
 4. PPID;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657590/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 5 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Arum Kismaharani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

AGUS SULISTYO



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR: 1/HK.03.1-KPT/3372/KPU-KOT/I/2018
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2018**

NO	STRUKTUR PPID	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua KPU Kota Surakarta
		2. PATA HINDRA ARYANTO	Anggota KPU Kota Surakarta
		3. NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota KPU Kota Surakarta
		4. SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota KPU Kota Surakarta
		5. KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota KPU Kota Surakarta
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. PATA HINDRA ARYANTO	Anggota KPU Kota Surakarta
		2. SRIDENTO, S.E., M.M.	Sekretaris
		3. ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum
		4. SETYO BUDIARTO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
		5. EKO BUDIANTO, S.IP.	Kepala Sub Bagian Program & Data
		6. MANTRINI INDRI HAPSARI, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum
3	Atasan PPID	SRIDENTO, S.E., M.M.	Sekretaris
4	PPID	SETYO BUDIARTO, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. RASMELIA A. KUSUMAWATY, A.Md.	Staf Pelaksana pada Subag Teknis dan Hupmas
		2. ANDREAS ARI SATRIO, A.Md.	Staf Pelaksana pada Subag Hukum
		3. DJAYANTI POETRIA HAPSARI, A.Md.	Staf Pelaksana pada Subag Program & Data
		4. ENNISA DYAH YANULIN, S.H.	Staf Pelaksana pada Subag Umum
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. RACHMAD PANJI SIDARTO, S.H.	Staf Pelaksana pada Subag Teknis dan Hupmas
		2. NOOR FARIDA RAHMALINA, A.Md.	Staf Pelaksana pada Subag Teknis dan Hupmas

ditetapkan di : Surakarta
 pada tanggal : 5 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA**

Ttd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR: 1/HK.03.1-KPT/3372/KPU-KOT/I/2018
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

A. Pertanggungjawaban Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

B. Uraian Tugas dan Wewenang

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Surakarta.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkungan KPU Kota Surakarta;

- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan Kepala masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan KPU Kota Surakarta.
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis kepada Pemohon Informasi;
 - b. Berkoordinasi dan membantu tugas serta fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan informasi kepada publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.

ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 5 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

Ttd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

